

***THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC GROWTH IN  
PALOPO CITY***

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI KOTA PALOPO**

**Adrian<sup>1</sup>, Hadrah<sup>2</sup>, Widyawanti Rajiman<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[pranataadrian3@gmail.com](mailto:pranataadrian3@gmail.com)<sup>1</sup>, [haedar@umpalopo.ac.id](mailto:haedar@umpalopo.ac.id)<sup>2</sup>, [widyawanti@umpalopo.ac.id](mailto:widyawanti@umpalopo.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of government spending on economic growth in Palopo City in 2013 - 2020. The government spending indicators used are direct spending and indirect spending. The data used in the research is GRDP data based on constant prices, government expenditure data according to the type of expenditure, namely direct expenditure and indirect expenditure published by BPS Palopo City in the form of time series data. The analytical method used is multiple regression analysis with the help of the SPSS program. The results of the research coefficient values show that the direct spending variable has no effect on economic growth, indirect spending has no effect on economic growth in the city of Palopo. Partially and simultaneously, direct spending and indirect spending have no effect on the economic growth of Palopo City.*

**Keywords:** *Direct Spending; Indirect Spending; Economic Growth*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo tahun 2013 – 2020. Indikator pengeluaran pemerintah yang digunakan adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data PDRB atas dasar harga konstan, data pengeluaran pemerintah menurut jenis belanjanya yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung yang diterbitkan oleh BPS Kota Palopo berupa data time series. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan variabel belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo. Secara parsial dan simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo.

**Kata Kunci :** *Belanja Langsung; Belanja Tidak Langsung; Pertumbuhan Ekonomi.*

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali menimbulkan dampak yang kompleks dan beragam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar. Meskipun angka-angka pertumbuhan ekonomi mungkin menunjukkan kemajuan, namun distribusi keuntungan seringkali tidak merata di antara lapisan masyarakat. Fenomena ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, meningkatkan disparitas pendapatan, dan memperburuk kondisi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi suatu kota, seperti Kota Palopo, dapat dipengaruhi

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat permasalahan terkait dampak sebenarnya dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

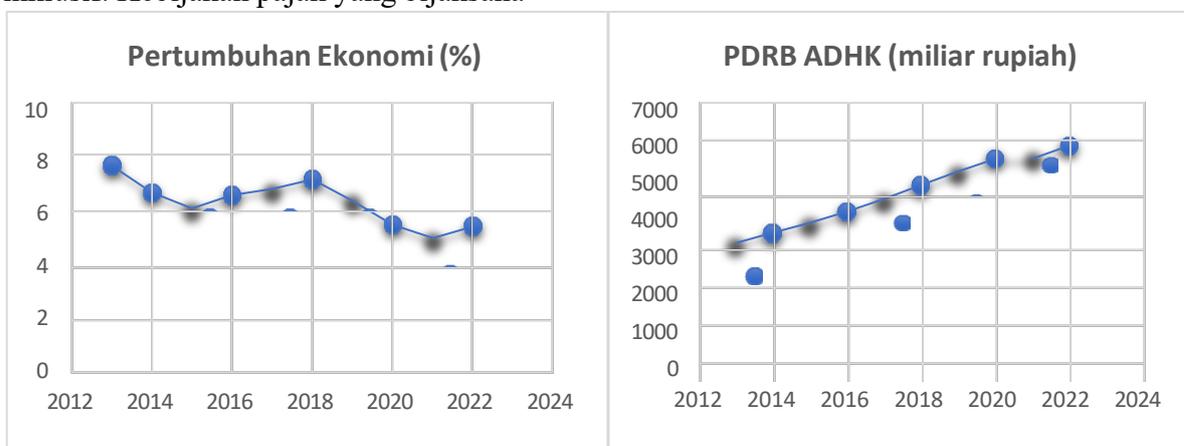
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang di laksanakan oleh suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi (Sulaiman, 2013). Pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi melibatkan sejumlah variabel yang relevan. Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan raya dan fasilitas umum, telah terbukti dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota, sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang terarah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat membentuk modal manusia yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dukungan terhadap sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga menjadi faktor kunci, dengan penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung perkembangan UKM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan pajak yang bijaksana

dan insentif yang tepat, serta pengeluaran pemerintah untuk riset dan pengembangan (R&D), juga berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Palopo.

Oleh karena itu, memahami dinamika antara pengeluaran pemerintah dan variabel-variabel tersebut dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai konteks. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Bawuno, E. E., Kalangi, J. B., & Sumual, J. (2015) menemukan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur perkotaan secara signifikan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Temuan ini konsisten dengan pendekatan yang menggarisbawahi pentingnya aksesibilitas dan konektivitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Adapun Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:



**Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Palopo Tahun 2013-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo (diolah), 2024

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun 2013 hingga 2022, dapat ditarik beberapa analisis singkat. PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) yang mencerminkan nilai ekonomi kota mengalami peningkatan dari 3.633,01 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 6.104,74 miliar rupiah pada tahun 2022. Meskipun terjadi kenaikan secara keseluruhan, terlihat adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palopo menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi mencapai 8,02%, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 (7,05%). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 7,52%. Setelah itu, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut hingga mencapai 5,41% pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Palopo selama periode 2013-2022 adalah sekitar 6,71%. Meskipun terdapat variasi tahunan, angka rata-rata tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota tersebut relatif stabil.

Dengan berkembangnya perekonomian Kota Palopo tentunya akan berdampak pada kenaikan PDRB perkapita. Hingga saat ini PDRB perkapita mencapai 51,18 juta rupiah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kota Palopo cenderung baik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam

mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara (Ayief Fathurrahman: 2012). Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan daerah, diperlukan dana dalam pelaksanaan urusan pemerintahan agar proses pembangunan daerah dapat terselenggara.

Pentingnya fokus pada pengeluaran untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas utama dalam memenuhi tanggung jawab daerah. Hal ini tercermin dalam peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang memadai, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Untuk mempermudah evaluasi kecukupan biaya suatu program atau kegiatan, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006, pengeluaran daerah terbagi menjadi dua jenis: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, seperti: Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dll. Sedangkan belanja langsung terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, seperti: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. (Chamdani, 2018).



**Gambar 1. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2012-2021 (dalam miliar rupiah)**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo. Data diolah

Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, terdapat sejumlah celah pengetahuan (*knowledge gap*) yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Temuan dari penelitian Patra dan Sabani (2017), menyoroti dominasi pengaruh PDRB terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah di Kota Palopo. Meskipun begitu, kekosongan literatur pada pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih fokus dan spesifik terhadap dinamika ekonomi di wilayah tersebut. Lebih lanjut, hasil penelitian Latif, dkk. (2024) menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran daerah di Sulawesi, memberikan landasan yang relevan. Namun, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk merinci faktor-faktor yang secara spesifik memengaruhi pengeluaran daerah di Kota Palopo, mengingat karakteristik unik dan konteks lokal daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini, belum terdapat

kajian yang secara khusus mengeksplorasi dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan adanya keperluan yang mendesak untuk penelitian yang lebih eksplisit, yang secara rinci menyelidiki pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks di Kota Palopo. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah, yang dianalisis dari perspektif belanja langsung dan belanja tidak langsung daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo pada periode waktu antara tahun 2013-2020.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. Hal ini sejalan dengan yang

dikatakan oleh Sukirno (2011) dalam Wau, dkk. (2022) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Selain itu, Iskandar (2013) dalam Wau, dkk. (2022) menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan per kapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.

## 2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Jika peran sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi menurun, pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong perkembangan sektor lain. Pengeluaran pemerintah daerah selama periode waktu tertentu disebut belanja. Belanja regional menurut kelompoknya terdiri dari:

### a. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan salah satu jenis pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Belanja langsung digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam hal kegiatan dan program yang dituliskan dalam peraturan daerah dengan tujuan agar meningkatkannya kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah. (Sinto, dkk: 2023)

### b. Belanja Tidak Langsung

Menurut Erlina dan Omar Sakti (2015), Belanja Tidak Langsung merupakan penetapan anggaran yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Perencanaan belanja tidak langsung memiliki peran yang berarti bagi kelancaran proses mekanisme sistem pemerintahan, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mencapai sarana dan tujuan pada setiap tahap pembangunan. Komponen-komponen belanja tidak langsung apabila dikelompokkan sesuai dengan jenis belanjanya mencakup: Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, dan Belanja tidak terduga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (t) untuk mengevaluasi pengaruh individu variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5% dan uji simultan (F) untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersama-sama. Selain itu, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh analisis dilengkapi

dengan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas model regresi.

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria statistik yang baik. Uji normalitas menggunakan rasio skewness dan kurtosis serta uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengevaluasi distribusi data. Multikolinieritas diuji melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan

toleransi, sedangkan autokorelasi dianalisis dengan Durbin-Watson test. Heteroskedastisitas diperiksa menggunakan White Test dengan probabilitas Obs\*R-squared. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada periode 2013-2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 1. Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.248	2.907		3.869	.012
Belanja Langsung (X1)	.001	.002	.123	.254	.810
Belanja Tidak Langsung (X2)	-.012	.009	-.635	-1.312	.246

a. *Dependent Variable*: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11.248 + 0,001 - 0,012 + e$$

- Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 11.248 artinya apabila tidak ada belanja langsung dan belanja tidak langsung nilai konstan atau sama dengan nol (0), maka pertumbuhan ekonomi nilainya sebesar 11.248
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Langsung (X1) Sebesar 0,001. Artinya bahwa setiap kenaikan 1%, maka akan diikuti kenaikan jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar 0.004 atau 0.01% dengan asumsi variable lain bernilai tetap.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Tidak Langsung (X2) sebesar -0,012. Artinya bahwa setiap kenaikan 1%, maka akan mengikuti penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.012 atau 1.2% dengan

asumsi variable lain bernilai tetap.

### Uji Hipotesis Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo

Hipotesis yang diuji untuk variabel Pengeluaran Pemerintah (Belanja Langsung) adalah sebagai berikut:

- **Hipotesis Nol (H0)**: Tidak ada pengaruh signifikan antara Pengeluaran Pemerintah (Belanja Langsung) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.
- **Hipotesis Alternatif (Ha)**: Terdapat pengaruh signifikan antara Pengeluaran Pemerintah (Belanja Langsung) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari nilai t dan p-value yang terkandung dalam tabel koefisien regresi. Dalam kasus ini:

- Koefisien regresi untuk Pengeluaran

Pemerintah (Belanja Langsung) adalah 0,001.

- Nilai t-hitung yang terkait dengan variabel ini adalah 0,254.
- Nilai p-value yang terkait adalah 0,810.

Berdasarkan nilai p-value yang lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang umumnya diambil sebesar 0,05, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengeluaran Pemerintah (Belanja Langsung) dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo. Interpretasinya adalah bahwa kenaikan 1% dalam Belanja Langsung tidak menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang signifikan berdasarkan model regresi ini.

#### Uji Parsial (Uji-t)

#### Uji Simultan (Uji-F)

**Tabel 2. Uji Simultan (Uji-F)**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	.927	2	.463	1.165	.384 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	1.989	5	.398		
	<i>Total</i>	2.916	7			

a. *Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)*

Dari tabel di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 1,165 sedangkan F-tabel pada tingkat kepercayaan 95% adalah 5,79 dengan tingkat probabilitas 0,384. Dengan demikian dapat disimpulkan, F-hitung = 1,165 < F-tabel = 5,79, berarti hipotesis Ho diterima dan

Berdasarkan hasil tabel 1.5, maka dapat diketahui bahwa:

- Variabel Belanja Langsung: t-hitung = 0,254 dan t-tabel 2,571 dengan tingkat probabilitas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan t-hitung = 0,254 < t-tabel 2,571 serta nilai p = 0,810 >  $\alpha$  = 0,05. Maka secara parsial Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Variabel Belanja Tidak Langsung t-hitung = -1,312 dan t-tabel 2,571 dengan tingkat probabilitas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan t-hitung = -1,312 < t-tabel 2,571 serta nilai p = 0,246 >  $\alpha$  = 0,05 Maka secara parsial Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

hipotesis Ha ditolak yang berarti Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.564 <sup>a</sup>	.318	.045	.631

a. *Predictors: (Constant), Belanja Tidak Langsung (X2), Belanja Langsung (X1)*

Dari Tabel 3 diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,318. Hal ini menunjukkan bahwa 0,318 atau 31,8% Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 31,8% sedangkan sisanya sebesar 68,2% dapat di jelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai bahwa variabel belanja langsung dan tidak langsung tidak berpengaruh. Hal ini sejalan dengan penelitian Afdal (2019) pengaruh investasi swasta dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo. Hasil penelitian mengenai uji t (parsial) dan uji f (simultan) juga menunjukkan bahwa belanja langsung dan tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo. Hal ini sejalan dengan penelitian irawari bawinti george M.V. kawung antonius y. luntung (2018) Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kepulauan talaud.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- a. Belanja langsung tidak berpengaruh pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
- b. Belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

Belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk pembangunan infrastruktur/sarana dan pelayanan publik sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo dapat di tingkatkan agar

lebih dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athurrahman, A. (2012). "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan kemiskinan". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 13 No.1*, hlm. 73.
- Biro Pusat Statistik Kota Palopo. 2015. *Statistik Daerah Kota Palopo*. BPS Kota Palopo.
- ... 2016. *Statistik Daerah Kota Palopo*. BPS Kota Palopo.
- ... 2017. *Statistik Daerah Kota Palopo*. BPS Kota Palopo.
- ... 2018. *Statistik Daerah Kota Palopo*. BPS Kota Palopo.
- ... 2019. *Statistik Daerah Kota Palopo*. BPS Kota Palopo.
- ... 2020. *Statistik Daerah Kota Palopo*. BPS Kota Palopo.
- ... 2021. *Statistik Daerah Kota Palopo*. BPS Kota Palopo.
- Chamdani, M. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2014. *Ekonomi Bisnis*, 24(1), 34-54.
- Eelina, Omar Sakti. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Selemba Empat. Jakarta
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika dasar (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Latif, F., Canon, S., & Santoso, I. R. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah daerah Se-Sulawesi Tahun 2013-2022. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3).
- Latif F, C. S. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan

- Pendapatan Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Se- Sulawesi Tahun 2013-2022. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 3.
- Patra, I. K., & Sabani, N. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pembangunan di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(1).
- Palopo, B. P. (2013). Statistik Daerah Kota Palopo. Dalam B. P. Statistik, Statistik Daerah Kota Palopo. BPS Kota Palopo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sinto, S., Zuhroh, D., & Cahyaningsih, D. S. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 12(2), 549-558.
- Sulaiman, 2013. *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung*. Skripsi Lampung.
- Wau, M., Leniwati, L., & Fau, J. F. (2022). Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual dan Empirik).
- Bawuno, E. E., Kalangi, J. B., & Sumual, J. (2015). Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).